




Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Kamis

Tanggal: 20 Desember 2018

Halaman: 1



Analisis KR
Yogya Kota Berkelanjutan?

Saratri Wilonoyudho

KEMACETAN di Kota Yogya sudah dalam taraf mengkhawatirkan. Beberapa kali hal ini diulas media termasuk Kedaulatan Rakyat. Wajar! Karena Yogyakarta tiap hari berkembang pesat. Data menyebutkan kenaikan jumlah kendaraan bermotor di Kota Gudug ini luar biasa. Kendaraan roda 2 naik 211 %, dari 71.566 unit (2016) menjadi 222.918 unit (2017), dan untuk kendaraan roda 4, ada kenaikan 344 % dari 12.746 unit (2016) menjadi 56.647 unit (2017). Padahal luas kota ini hanya 46 Km².

Yogyakarta bersama-sama dengan kota-kota lain di Indonesia sedang menuju menjadi megapolitan. Menurut Cohen (2006), awal abad XX hanya ada 16 kota di dunia yang berpenduduk lebih dari satu juta jiwa. Namun sekarang ada sekitar 400 kota di dunia yang berpenduduk satu juta jiwa atau lebih. Menurut John Friedmann (dalam Laquian, 2008), tipe-tipe *urban fields* akan melebar ke luar dari batas administratif pusat kota sejauh 100 kilometer. Dalam istilah McGee fenomena kewilayahan seperti itu disebut *edesakotal*, karena ada percampuran antara karakter kota dan karakter perdesaan yang unik.

* Bersambung hal 7 kol 1

Yogya

Kedudukan Yogyakarta sebagai ibukota DIY, tentu mendapat beban yang berat, apalagi kampus-kampus mulai berkembang. Menurut berbagai penelitian, munculnya kampus (baru) menjadi salah satu pemicu berkembangnya sebuah kota, karena akan diikuti dengan berbagai pusat-pusat pelayanan (bisnis) bagi kebutuhan civitas akademika. Mulai kos-kosan, jasa (warung makan, foto copy, toko, pencucian, service, dst) sampai tempat wisata, tempat hiburan dan olahraga.

Wajar pula jika Yogyakarta kini menjadi daya tarik kaum urban untuk mengadu nasib mencari makan. Studi tentang urbanisasi menjadi sesuatu hal yang menarik karena ada dua kubu pendapat. Kelompok pertama mengatakan urbanisasi merupakan sesuatu hal yang menguntungkan. Namun kelompok kedua sebaliknya mengatakan bahwa urbanisasi akan banyak membawa berbagai masalah yang sangat mengkhawatirkan. Anggapan optimis Stanislaw Welfisz dari Universitas Columbia Amerika Serikat (lihat pula *The World Bank*, 1994) mengatakan, urbanisasi berkaitan erat dengan peningkatan *Gross National Product* atau GNP per kapita. Beberapa negara seperti Venezuela, Argentina, Cili, Uruguay, lebih dari 80 % penduduknya tinggal di kota. Di Belanda, Inggris, Belgia, Jerman, Denmark juga memiliki tingkat urbanisasi di atas 80%. Sebaliknya di Afrika sub-Sahara, Asia Selatan dan Asia Timur relatif rendah.

Yang menjadi masalah, urbanisasi di Indonesia, belum diikuti pertumbuhan ekonomi yang mencukupi, hingga muncul istilah 'urbanisasi berlebihan'. Kota-kota besar di tanah air hanya dijejali sektor informal, dan bukan sektor industri yang ikut memacu pertumbuhan ekonomi. Kota-kota besar di tanah air hanya menjadi 'peri-peri' dalam peta kapitalisme dunia. Bahkan hanya sebagai agen konsumtivisme.

Lihat saja mal-mal kita banyak dijejali dengan berbagai produk impor (menuurut BPS 56% lebih impor kita adalah barang jadi). Sementara ekspor kita lebih dari 90% adalah bahan mentah belum diolah. Betapa senggangnya ekonomi (kota) kita. Artinya global ekonomi nampaknya dikomando dan dikontrol dari pusat kapitalisme dunia demikian kata Saskia Sassen (dalam Melchert, 2005).

Dari titik inilah Yogyakarta harus memikirkan pola manajemen kota untuk menuju kota yang berkelanjutan. Kota berkelanjutan adalah kota yang tidak meninggalkan beban bagi anak cucu kita ke depan. Mereka harus mendapat mutu kehidupan yang minimal sama dengan yang dinikmati generasi saat ini, syukur lebih baik lagi. Yogyakarta harus menjadi kota yang nyaman dan aman untuk ditinggali, untuk bekerja, dan untuk mencari hiburan bagi kesegaran jiwa.

Reformasi dan revitalisasi manajemen pembangunan kota yang berkelanjutan ini menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan di tengah makin menururnya mutu lingkungan hidup. Makin terkurasnya sumberdaya alam (termasuk lahan subur), makin sempitnya daya tampung sosial, serta makin rakusnya manusia (kota) dalam menggunakan energi yang tidak terbarukan. Siapapun yang sepakat bahwa kota merupakan tempat kehidupan yang tidak terelakkan bagi sebagian besar generasi mendatang, akan sampai pada kesimpulan yang sama : manajemen kota berkelanjutan harus dimulai dari sekarang.

(Penulis adalah Ketua Koalisi Kependudukan Jateng, Anggota Dewan Riset Daerah Jateng)-I
IG. TRIHASTONO, S.Sos. MM

| Instansi | Nilai Berita | Sifat |
|---------------------------|--|---|
| 1. Bappeda Kota YK | <input type="checkbox"/> Negatif | <input type="checkbox"/> Amat |
| 2. | <input type="checkbox"/> Positif | <input type="checkbox"/> Seger |
| 3. | <input checked="" type="checkbox"/> Netral | <input checked="" type="checkbox"/> Biasa |
| 4. | | |
| 5. | | |

- Untuk diketahui

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|----------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Badan Perencanaan Pembangunan | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 30 November 2024
Kepala

IG. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005